

## Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

### *Payroll Accounting System Analysis at the Regional Revenue Service of Central Sulawesi Province*

<sup>1</sup>Muhammad. Fadli\*, <sup>2</sup>Rajindra, <sup>3</sup>Guasmin

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(\*)Email Korespondensi: [Muhammad.fadli@gmail.com](mailto:Muhammad.fadli@gmail.com)

#### Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan menganalisis apakah sistem akuntansi penggajian di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah ideal dan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model interaktif yang sebagaimana dibuat oleh Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Fungsi yang terkait sistem penggajian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya menjalankan tugas dengan baik karena terjadi perangkapan tugas yang dilakukan bagian keuangan/bendahara yakni sebagai pembuat daftar gaji dan upah juga pembayaran gaji, dokumen yang digunakan pada sistem penggajian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik, tetapi masih belum sempurna karena tidak ada dokumen amplop gaji. Sistem otorisasi belum seluruhnya mendukung unsur efektifitas dan efisiensi yang terkait penggajian dan pengupahan karena belum menunjukkan bukti pertanggung jawaban pihak-pihak yang berwenang didalamnya serta pelaksanaan sistem penggajian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya melaksanakan praktek yang sehat karena absensi Xpegawai kurang diawasi oleh bagian penggajian.

**Kata Kunci:** Analisis; Sistem Akuntansi; Penggajian

#### Abstract

*The purpose of this study is to find out how the payroll accounting system at the Regional Revenue Service of Central Sulawesi Province and analyze whether the payroll accounting system at the Regional Revenue Service of Central Sulawesi Province is ideal and can support the effectiveness and efficiency of performance. The research used by the author is a type of research that is field research conducted at the Regional Revenue Service of Central Sulawesi Province. In using data analysis techniques, the authors refer to techniques that are commonly used by researchers, namely the interactive model data analysis technique as created by Miles and Huberman. In qualitative research, findings or data can be declared valid if there is no difference between what was reported by the researcher and what actually happened to the object under study. Based on the results of the study, it is known that the functions related to the payroll system at the Central Sulawesi Provincial Revenue Service have not all carried out their duties properly because there was a dual task carried out by the finance / treasurer, namely as a maker of payroll and wages as well as salary payments, documents used in the payroll system at the Office The income of Central Sulawesi Province is quite good, but it is still not perfect because there is no salary envelope document. The authorization system has not fully supported the elements of effectiveness and efficiency related to payroll and wages because it has not shown evidence of the accountability of the authorities in it and the implementation of the payroll system at the Central Sulawesi Provincial Revenue Service has not fully implemented healthy practices because employee absenteeism is not supervised by the payroll department.*

**Keywords:** Analysis; Accounting System; Payroll

## PENDAHULUAN

Keberlangsungan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan pegawainya. Bahkan bisa dikatakan bahwa pegawai adalah urat nadi keberlangsungan organisasi. Organisasi yang memiliki pegawai dengan kinerja yang baik akan berbanding lurus dengan capaian organisasi sesuai dengan target yang diharapkan (1).

Untuk mendukung kinerja pegawai yang merupakan salah satu sumber daya perusahaan akan maksimal jika didukung dengan diterapkannya sistem akuntansi pada organisasi tersebut. Pada banyak organisasi sistem akuntansi yang berjalan dengan baik sudah merupakan kebutuhan dalam rangka mendukung proses kegiatan (2).

Tidak berjalannya sistem akuntansi akan dapat mengakibatkan kurang efektifnya kinerja yang ada dalam sistem penggajian, maka dari itu sangat diperlukan pengendalian dalam penerapan sistem penggajian dalam organisasi yang berguna untuk mengatur dan mengendalikan seluruh transaksi beserta kegiatan yang berhubungan dengan gaji. Sistem dan prosedur diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian secara efektif (2).

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan organisasi perangkat daerah yang berada dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Organisasi ini merupakan organisasi yang cukup memiliki peran penting sebagai pintu masuk bagi berbagai sumber pendapatan yang menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal tersebut sistem akuntansi yang baik perlu dimiliki dalam menjamin kinerja organisasi juga berjalan dengan baik termasuk dalam hal penggajian. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah menerapkan sistem akuntansi penggajian. Sistem akuntansi ini yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja terutama yang terkait langsung dengan sistem penggajian. Namun sebagai sebuah sistem yang diharapkan memberikan hasil maksimal, tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan pengelolaan maupun kesalahan dari sistem yang diterapkan itu sendiri. Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur secara khusus tentang standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi penggajian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang setiap datanya diperoleh secara langsung pada objek penelitian (3). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi penggajian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model interaktif yang sebagaimana dibuat oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246) mengatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: pengumpulan data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (4).

## HASIL

### Pengendalian Intern pada Sistem Penggajian di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah

Penerapan Pengendalian Internal pada Sistem Penggajian di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Penerapan fungsi pembuatan daftar gaji di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan terpisah dari fungsi kepegawaian dengan fungsi pencatatan waktu hadir yang juga terpisah dari fungsi operasi.

Sistem otorisasi di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah diterapkan dengan mencantumkan setiap kelengkapan berkas legalitas dalam acuan daftar gaji setiap pegawai. Artinya setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh penanggungjawab tertinggi sesuai wewenang. Hal tersebut sejalan dengan penerapan perubahan gaji pegawai sebagai akibat perubahan pangkat, telah didasarkan pada surat keputusan yang legal.

## **Penerapan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Penggajian di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah**

Unsur efektifitas dan efisiensi dalam penggajian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut: 1) Organisasi, fungsi pembuat daftar gaji dan upah pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan oleh bagian keuangan/bendahara, fungsi pencatatan waktu hadir dilakukan oleh kepegawaian. 2) Sistem otorisasi, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji tidak ada surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai OPD yang ditandatangani oleh Kepala Badan. 3) Setiap perubahan gaji pegawai karena perubahan jabatan, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga didasarkan pada pengusulan dari Kepala Badan. 4) Setiap potongan atas gaji didasarkan atas surat potongan gaji dan upah tidak diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 5) Kartu jam hadir dari mesin pencatat waktu diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. 6) Perintah lembur diotorisasi oleh kepala departemen pegawai yang bersangkutan. 7) Daftar gaji diotorisasi oleh fungsi keuangan. 8) Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji diotorisasi oleh fungsi akuntansi.

Prosedur Pencatatan: 1) Perubahan dalam catatan penghasilan pegawai direkonsiliasi dengan daftar gaji. 2) Besaran gaji yang dicantumkan dalam daftar kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi.

Praktik yang Sehat: 1) Kartu jam kerja dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi gaji langsung. 2) Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu tidak diawasi. 3) Pembuatan daftar gaji diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. 4) Perhitungan pajak penghasilan pegawai direkonsiliasi dengan catatan penghasilan pegawai. 5) Catatan penghasilan pegawai disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji yaitu bagian keuangan/bendahara. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Andi Arianza selaku kepala bagian keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 08.00 sebagai berikut:

Dalam proses penggajian yang terlibat Sub Bagian Kepegawaian, keuangan/bendahara dan akuntansi. Sub Bagian Kepegawaian yang bertugas merekap absen, bagian keuangan membuat daftar gaji dan upah, bagian akuntansi bertugas untuk mengecek ulang daftar gaji. Setelah daftar gaji dan upah pegawai selesai, bagian keuangan melapor ke bank mengenai besaran gaji masing-masing pegawai untuk ditransferkan kepada masing-masing rekening pegawai, kemudian bagian keuangan menyerahkan nota pembayaran tersebut kepada bagian akuntansi untuk membuat semacam bukti pengeluaran kas untuk beban gaji dan upah pegawai.

### **Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah.**

Penggajian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari perhitungan gaji induk yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Setelah gaji induk dihitung dan dibekukan maka bendahara pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan dikirim kepada Kepala Dinas sekaligus ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan lalu dikirim ke Biro Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, seterusnya bagian perbendaharaan menerbitkan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D). Setelah SP2D ditandatangani maka IT akan mengkonfirmasi ke Bank SULTENG. Lalu dinas membuat cek untuk melakukan pencairan sebesar yang diminta. Pembantu Bendahara Pengeluaran (bagian gaji) yang mencairkan dan membagikannya ke para pegawai sesuai gaji induknya.

Sistem Informasi Akuntansi telah berkembang dalam tahap sistematis secara manual dan terpusat dibagian keuangan Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan tetapi belum integrate atau yang biasa disebut dengan sistem tumpuk informasi. Sehingga satu kesatuan informasi data gaji induk untuk para pegawai belum terdapat pada satu area. Output yang dihasilkan berupa informasi data gaji induk untuk para pegawai. Data gaji induk para pegawai terdiri dari gaji pokok tambahan, tunjangan-tunjangan dan dikurangi potongan-potongan.

## **PEMBAHASAN**

Pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi

penggajian, jaringan prosedur dalam sistem akuntansi penggajian, dan unsur efektifitas dan befisiensi penggajian. Pembahasan lebih lanjut tentang berbagai hal tersebut adalah sebagai berikut:

### **Fungsi yang Terkait Dengan Sistem Akuntansi Penggajian**

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016) dijelaskan bahwa proses penggajian pegawai dalam OPD harus melibatkan beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, Fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan (5).

Dari uraian hasil penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penggajian dan pengupahan di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah ada fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi.

Fungsi kepegawaian dilaksanakan dengan baik oleh Sub Bagian Kepegawaian dan umum dengan menyelenggarakan seleksi dan penempatan pegawai sesuai yang dibutuhkan.

Fungsi pencatat waktu hadir pegawai yang dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian dan umum belum menjalankan tugasnya dengan baik karena pada saat pegawai melakukan pengisian absensi menggunakan *finger print* bagian personalia tidak melakukan pengawasan dengan alasan karena menggunakan finger print tidak mungkin pegawai bisa nitip absen.

Fungsi pembuat daftar gaji dilakukan oleh sub bagian keuangan dan aset, namun bagian bendahara juga melakukan pembayaran gaji kepada pegawai jadi ada perangkapan tugas. Hal ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah karena dianggap lebih efisien jika yang membayarkan gaji adalah bagian yang membuat daftar gaji karena yang lebih tahu rincian besaran gajinya adalah bagian keuangan/bendahara.

Fungsi akuntansi telah dijalankan dengan baik karena telah melakukan pencatatan yang berhubungan dengan penggajian ke dalam jurnal umum. Fungsi keuangan/bendahara juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu bertanggung jawab untuk menstransfer uang gaji lewat bank dan juga membuat slip gaji yang nantinya akan dibagikan kepada pegawai.

### **Dokumen yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi Penggajian**

Dari uraian hasil analisis di atas maka dapat diketahui bahwa dokumen yang digunakan dalam proses penggajian belum cukup memenuhi prosedur dalam mendukung pengendalin intern, karena dokumen yang dibuat oleh OPD belum lengkap dan belum sesuai dengan teori sistem akuntansi penggajian. Ada satu dokumen yang tidak ada yaitu amplop gaji, hal ini dikarenakan di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah pembayaran gaji lewat ATM dan yang diberikan hanya slip gaji dan bukti transfer yang langsung dibagikan ke pegawai oleh bagian keuangan tanpa menggunakan amplop.

Dokumen-dokumen sudah dibuat oleh bagiannya masing-masing. Dokumen pendukung perubahan Gaji dibuat oleh Sub Bagian Kepegawaian dan umum, Kartu jam hadir dengan mesin pencatat waktu, kartu jam kerja, daftar gaji dibuat oleh bagian keuangan/bendahara, surat pernyataan gaji dibuat oleh bagian keuangan/bendahara, bukti kas keluar dibuat oleh bagian akuntansi.

### **Catatan Akuntansi yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi Penggajian**

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (2016) catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian meliputi jurnal umum, kartu harga pokok produk, kartu biaya, dan kartu penghasilan pegawai (5). Catatan yang digunakan di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah juga sama yaitu jurnal umum, kartu harga pokok produk, kartu biaya, dan kartu penghasilan pegawai, oleh karena itu, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang terkait dengan catatan akuntansi telah sesuai dengan ketentuan yang harus dipenuhi.

### **Jaringan Prosedur Dalam Penggajian Di Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah**

Prosedur pencatatan waktu hadir dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Prosedur ini dilakukan OPD kurang sempurna karena absensi yang dilakukan kurang mendapatkan pengawasan, karena dianggap dengan menggunakan finger print pegawai tidak mungkin bisa titip absen. Prosedur pencatatan waktu kerja sudah dilakukan dengan baik oleh kepala produksi. Waktu kerja ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan efektifitas dan efisiensi.

Prosedur pembuatan daftar gaji belum dilakukan dengan baik oleh bagian keuangan/bendahara, pembuatan daftar gaji ini berdasarkan rekap absen yang dibuat oleh Sub Bagian Kepegawaian dan umum. Berdasarkan daftar gaji maka dibuatlah permintaan pengeluaran kas kecil.

Sebaiknya daftar gaji diotorisasi oleh fungsi kepegawaian atau Sub Bagian Kepegawaian dan umum untuk melihat nama-nama yang terdapat dalam daftar gaji telah sesuai dengan data pegawai.

Namun hal tersebut tidak dilakukan, yang mengotorisasi daftar gaji bagian keuangan itu sendiri, dengan diotorisasi oleh Sub Bagian Kepegawaian dapat mengurangi terjadinya salah gaji yang dilakukan bagian penggajian dan agar dokumen yang dihasilkan dapat diandalkan.

Prosedur pembayaran gaji dilakukan oleh bagian keuangan/bendahara, ada perangkapan tugas antara pembuat daftar gaji dan pembayaran gaji. Hal ini dilakukan karena OPD menganggap lebih efisien jika yang membayarkan gaji adalah bagian yang membuat daftar gaji karena yang lebih tau tentang rincian gaji yang akan diterima pegawai Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan bahwa prosedur yang membentuk sistem belum seluruhnya dapat mendukung efektifitas dan efisiensi.

### Justifikasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan hasil temuan penelitian di atas, ada beberapa temuan diantaranya adalah dokumen yang digunakan belum cukup memenuhi prosedur dalam mendukung efektifitas efektifitas dan efisiensi karena tidak adanya dokumen amplop gaji, sesuai dengan teori Romney dan Steinbart (2005) menyatakan bahwa berbagai dokumen dan catatan-catatan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pengendalian. Dokumen yang lengkap dengan instruksi yang jelas akan memfasilitasi pencatatan transaksi penggajian yang akurat dan efisien (6).

Maka sebaiknya OPD tetap memberikan amplop gaji yang berisi slip gaji dan bukti transfer karena dengan pemberian slip gaji dan bukti transfer kepada pegawai tanpa amplop akan mudah hilang. Sedangkan uang gaji tetap diberikan melalui ATM.

Pengawasan dalam memasukkan kartu jam hadir sangat penting, karena jika tidak ada pengawasan dikhawatirkan dapat memicu pegawai melakukan titip absen kepada pegawai lain. Pemasukkan kartu jam hadir pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada yang mengawasi, maka dari itu sebaiknya dalam pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu ada pengawasan, mungkin tugas ini bisa diberikan kepada satpam atau petugas piket untuk mengawasi. Karena kartu absensi yang berisi jam datang, jam pulang, dan lembur pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan gaji pegawai.

Dalam sistem otorisasi daftar gaji yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Kepegawaian dan Umum namun diotorisasi oleh keuangan. Untuk menghindari adanya penyelewengan sebaiknya daftar gaji diberikan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk dilakukan *check* terlebih dahulu atas nama-nama yang ada dalam dokumen daftar gaji setelah itu dilakukan pengecekan ulang oleh keuangan/bendahara sebelum diuangkan, maka pengecekan dilakukan bertahap, bukan hanya dipercayakan pada satu bagian saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyelewengan yang mungkin bisa terjadi.

Adanya perangkapan tugas dalam prosedur pembuat daftar gaji dan pembayaran gaji, dengan adanya perangkapan tugas pada OPD maka akan memberikan celah timbulnya tindak kecurangan dalam bagian tersebut. Maka sebaiknya OPD memisahkan tugas ke dalam fungsinya masing-masing, bisa dengan salah satu dari Sub Bagian Kepegawaian ditugaskan untuk menjadi fungsi pembuat daftar gaji dan pembayaran gaji dilakukan oleh bagian keuangan.

Sehingga tidak terjadi perangkapan tugas yang dilakukan bagian keuangan/bendahara dan prosedur sistem penggajian dan pengupahan dapat mendukung efektifitas efektifitas dan efisiensi.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan terkait sistem penggajian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya menjalankan tugas dengan baik karena terjadi perangkapan tugas yang dilakukan bagian keuangan/bendahara yakni sebagai pembuat daftar gaji dan upah juga pembayaran gaji. Dokumen yang digunakan pada sistem penggajian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik, tetapi masih belum sempurna karena tidak ada dokumen amplop gaji. Catatan akuntansi sistem sistem penggajian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup dilakukan jadi dapat mendukung efektifitas efektifitas dan efisiensi. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian dan pengupahan belum seluruhnya berjalan efektif karena absensi pegawai kurang diawasi oleh bagian penggajian, sehingga dapat memicu resiko titip absen dan terjadinya kesalahan atau tindak kecurangan lain dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah belum cukup baik karena tidak memisahkan fungsi pembuat daftar gaji dan juru bayar gaji.

Kemudian sistem otorisasi belum seluruhnya mendukung unsur efektifitas dan efisiensi yang terkait penggajian dan pengupahan karena belum menunjukkan bukti pertanggung jawaban pihak-pihak yang berwenang di dalamnya serta pelaksanaan sistem penggajian pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah belum seluruhnya melaksanakan praktek yang sehat karena absensi pegawai kurang diawasi oleh bagian penggajian.

### **SARAN**

Rekomendasi saran Sebaiknya tidak terjadi perangkapan tugas yang dilakukan bagian keuangan/bendahara. Sebaiknya dalam pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu adanya pengawasan, mungkin tugas ini bisa diberikan kepada satpam atau petugas piket untuk mengawasi. Karena kartu absensi yang berisi jam datang, jam pulang pegawai yang dapat digunakan sebagai dasar pembayaran gaji pegawai. Dan Sebaiknya daftar gaji diberikan kepada Sub Bagian Kepegawaian untuk dilakukan *check* terlebih dahulu atas nama-nama yang ada dalam dokumen daftar gaji setelah itu dilakukan pengecekan ulang oleh keuangan/bendahara sebelum diumumkan, maka pengecekan dilakukan bertahap, bukan hanya dipercayakan pada satu bagian saja.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Rajindra R, Mattulada A, Guasmin G, Anggraeni RN, Haryani S. Kinerja Keuangan (UMKM) Melalui Kebijakan Pendanaan dan Modal Kerja di Kabupaten Donggala. *J Sinar Manaj.* 2018;5(2):126–34.
2. Ernawati NW, Rajindra R, Yusuf D. ANALISIS PENGELOLAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI HUTAN LINDUNG PALU POSO. *J Sinar Manaj.* 2020;7(1):42–9.
3. Rukajat A. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish; 2018.
4. Persada G. hal. 288 Sugiyono. 2009. Metod Penelit Kuantitatif Kualitatif dan.
5. Mulyadi R. Pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja keuangan. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kaji Ilm Akunt.* 2016;3(1).
6. Romney Marshal S. Accounting Information System (Buku Dua). Jakarta: Salemba Empat. 2005;